

Indikator Indonesia Sekitar ICT dan Pengembangan CAP

Oleh Rudy Rusdiah

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Warnet Komunitas Telematika

Di Indonesia, warnet swasta berkembang subur di daerah perkotaan. Asosiasi Pengusaha Warnet Komunitas Telematika (APW-Komitel) membuat data di mana 4.000 warnet (akhir 2003) dan sekitar 5.000 warnet akhir 2004 yang kami identifikasikan terletak di daerah keramaian di kota-kota besar. Warnet berada di 95 kota-kota yang terdiri dari ibukota provinsi dan kabupaten/kota atau 21,6% dari total kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Kalau dirata-rata dengan menggunakan data desa yang kami peroleh dari BPS pada 2002, diperkirakan meliputi 2.910 desa (diurban/perkotaan).

Sementara kritik kami terhadap metode pengumpulan data dari *workshop* di Meksiko beberapa waktu lalu misalnya satu warnet ada di satu kota, belum tentu warnet tersebut mampu menjangkau populasi kota tersebut. Namun bagi International Telecommunication Union (ITU), hal itu terpaksa dilakukan untuk dapat menghitung bahwa di satu kota atau di satu kecamatan ada warnet. Artinya, ada kemungkinan bahwa desa di kecamatan tersebut sudah terjangkau oleh warnet atau telecenter. Nah tentu istilah terjangkau dari ITU, mempunyai arti yang lain dengan jumlah pengunjung warnet dalam konteks yang komersial.

Misalnya satu warnet meliputi satu kecamatan/kota menurut perhitungan ITU yang kami buat di bawah ini, berarti warnet tersebut dapat dinikmati oleh seluruh penduduk di kecamatan

tan/kota tersebut atau minimal dapat diakses oleh penduduk dari kecamatan/kota tersebut (potensi populasi). Tadinya kami ingin menggunakan metode kami, yaitu menggunakan jumlah pengunjung dari sebuah warnet (potensi *user*), tapi menjadi sulit untuk dijadikan perhitungan tabel yang merujuk pada target *Plan of Action* dari WSIS yang menggunakan basis populasi desa/kota sebagai dasar perhitungan. Jadi hati-hati membaca tabel ini, karena tabel tersebut menunjukkan potensi atau kemampuan dari CAP/Warnet atau PIAC dalam memenuhi kewajiban dari target WSIS untuk membangun masyarakat informasi tahun 2015.

Namun melalui metode ITU (potensi populasi) atau metode APWKomitel (potensi *user*/pengunjung), tetap saja dapat dilihat bahwa peranan swasta di Tanah Air sangat strategis dalam membantu pemerintah memecahkan masalah kesenjangan digital di 21,6% dari seluruh kabupaten/kota yang ada di daerah perkotaan. Peran pemerintah dalam membangun akses tersebut di daerah perkotaan jauh lebih kecil. PT Pos Indonesia dan Kementerian Ristek melalui warintek hanya membangun di 50 kota besar saja atau kalau kita menggunakan *measurement* dengan model desa, sekitar 11,36% atau sekitar 1.530 desa saja (juga

didaerah urban/perkotaan).

Sulitnya memperoleh data serta seringnya dijumpai perbedaan data dari berbagai instansi membuat kami menggunakan data sensus 2000 dari BPS untuk menentukan pola distribusi penduduk rural/urban. Sementara data BPS 2002 digunakan untuk menentukan peta jumlah kecamatan/kota dan kabupaten yang kami padukan dengan data warnet yang kami miliki saat membuat buku yang kami terbitkan awal 2004 (data 2003).

oleh pemerintah saat ini, masih terbatas pada penyediaan telekomunikasi suara, bukan data. Mayoritas teknologi menggunakan telepon satelit, bukan VSAT untuk CAP). Timbul argumen-tasi, apakah kita akan memberikan PC di suatu pedesaan, kalau masyarakatnya masih belum siap menerimanya dan ini tantangan besar kita semua yang *concern* ?

Di Meksiko, pemerintahnya sangat berperan aktif dalam pembangunan ICT. Sampai saat

ban). Di Meksiko peranan swasta tenggelam, karena mereka tidak memiliki suatu institusi (semacam asosiasi seperti yang kita miliki). Jadi peranan sektor swasta, serta PPP di Indonesia menjadi kebanggaan tersendiri. Dan, peranan kami (APW-Komitel) di forum internasional seperti ini mendapatkan perhatian dari ITU, maklum mayoritas peserta *workshop* tentu diwakili oleh staf ahli ditjen postal atau dari BPS suatu negara.

Sistem Waralaba

Pembangunan CAP di pedesaan adalah tugas pemerintah. Swasta tidak mungkin membangun CAP di pedesaan karena kami kalau berinvestasi harus memperhitungkan aspek bisnisnya. Millenia Net Café sebagai anggota dari APWKomitel mencoba menerapkan model warnet masa depan MCI Center dengan sistem waralaba. Millenia sudah memiliki delapan gerai. Untuk mengembangkannya ke kota-kota yang lain, kami terhambat oleh SDM. Oleh karena itu ekspansi ke daerah hanya dimungkinkan dengan model *franchising* bekerjasama

dengan investor daerah yang menjadi *master franchise* di sebuah provinsi. Investasi per gerai untuk model *full resto/café* di mal memang agak mahal yaitu minimal membutuhkan modal Rp 500 juta. Namun model *booth* di tengah mal bisa menekan investasi hingga dibawah Rp 200 juta. Daerah pedesaan belum *feasible* alias belum menguntungkan untuk investasi bisnis swasta. Oleh sebab itu, hal tersebut menjadi tugas pemerintah yang mengutip dana USO sekitar 0.75% dari pendapatan para pemain besar (*incumbent*) telekomunikasi (ada regulasi pemerintah mengenai ketentuan USO). □

Table: Distribusi Warnet/CAP/PIAC terhadap Desa & Jumlah Penduduk di Indonesia (ITU Mexico November 2004/APWKomitel) :

Jumlah Localities (desa /populasi)	Partisipasi Pemerintah membangun Warnet/DCC		Partisipasi Swasta membangun Warnet/CAP		Total penetrasi dalam %
	*Jumlah BPS 2000	Localities (desa) *Jumlah BPS 2002)	Jumlah Penduduk	Localities (desa)*Jumlah BPS 2002)	
Urban	13,472 desa (19.5%) 86,406,587 jiwa (41.98%)	50 kantor pos & 20 perpustakaan di 50 kota besar atau ~1,530 desa	meliputi ~9,813,420 jiwa	~4,000 warnet di ~95 kota /kabupaten meliputi 2.910 desa	18,664,740 21.6%
Rural	55,634 desa (80.5%) 119,436,609 jiwa (58.02%)	Rencana 4 telecenter ic: ePabelan meliputi ~45 desa	~96,615 jiwa	1 Telecenter meliputi 11 desa	120,232 0.1%
Total	69,112 desa 205,843,000	Meliputi ~1575 desa	Meliputi ~9,910,035 jiwa	Meliputi 2,921 desa	18,784,972 ~21.7%

Note: Data warnet, telecenter, BIM, warnet pos, warintek dikumpulkan oleh APWKomitel 2003 dalam sebuah buku dengan judul "Multipurpose Community Internet Center" Grasindo, Maret 2004, Rudy Rusdiah, ISBN: 979-732-400-1.

Sehingga menjadi catatan, bahwa *time frame* dari masing masing data sedikit berbeda. Beberapa negara seperti Papua Nugini, menurut pembicaranya malah belum dapat menghasilkan tabel-tabel yang diinginkan oleh ITU ini, karena sulitnya memperoleh data dan minimnya peran dari pemerintah dalam pengembangan ICT, karena masih banyak prioritas yang lain.

Kecilnya peran pemerintah tersebut membuat kami lebih *concern* berpartisipasi dengan program *Public Private Partnership* (PPP). Bahkan di daerah pedesaan sekalipun, program *Universal Service Obligation* (USO)

ini mereka sudah membangun sekitar 3.200 *community access point* (CAP) yang di sana dikenal sebagai *digital community center* (DCC) dan mencakup 2.400 *municipal* (kecamatan). Sebagai perbandingan Meksiko menggunakan unit kecamatan, sedangkan kita menggunakan desa untuk ukuran *localities*, agar konsisten dengan WSIS Plan of Action dan target USO kita. Pada 2006 nanti, akan ada 10.000 DCC di Meksiko dengan menggunakan jaringan VSAT (Red Satelital e-Mexico). Dan hebatnya, DCC itu dibangun tidak saja di daerah pedesaan (rural), tapi juga di perkotaan (ur-

Tabel 2: Indikator Infrastruktur Telematika (IT, Telekomunikasi, Media & Listrik)

